



---

## Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Sektor Transportasi Umum (Trans Musi dan Angkutan Umum) Di Kota Palembang

Muhammad Fadly Maulana<sup>1</sup>, Aris Pirgilang Mursa Putra<sup>2</sup>

Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: : [muhammadfdly745@gmail.com](mailto:muhammadfdly745@gmail.com), [mursagilang@gmail.com](mailto:mursagilang@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the management of regional assets in the public transportation sector, specifically the Trans Musi service and city transportation (angkot) in Palembang City. The focus of the study lies on the cessation of operations of the large-sized Trans Musi busses and its impact on service quality and asset management effectiveness. The research uses a descriptive qualitative approach thru literature study with content analysis techniques. The research results indicate that the management of public transportation assets is not yet optimal, particularly in the aspects of maintenance and fleet replacement planning. The absence of large busses affects the transport capacity and has the potential to reduce service quality. Therefore, an evaluation and strategic planning are necessary to ensure that the management of regional transportation assets is more effective, sustainable, and meets the needs of the community.*

**Keywords:** regional asset management; public transportation; Trans Musi; city transport; Palembang City.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset daerah pada sektor transportasi umum, khususnya layanan Trans Musi dan Angkutan Kota (angkot) di kota Palembang, fokus kajian terletak pada tidak lagi beroperasinya bus berukuran besar Trans Musi serta dampaknya terhadap terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas manajemen aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset transportasi umum belum optimal, terutama pada aspek pemeliharaan dan perencanaan penggantian armada. Ketiadaan bus besar berdampak pada penurunan kapasitas angkut dan berpotensi menurunkan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perencanaan strategis agar pengelolaan aset transportasi daerah lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Pengelolaan aset daerah, transportasi umum, Trans Musi, angkutan kota, kota Palembang

## PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Pengelolaan aset salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat daerah. Regulasi terkait manajemen aset daerah yang menekankan prinsip transparansi serta keselarasan dengan sistem penganggaran tetap diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Ilham Faried Arrahman Aituarauw, 2021). Transportasi umum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas serta mobilitas masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, sarana transportasi tersebut juga termasuk bagian dari aset daerah yang harus dikelola secara optimal. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dipertahankan dan dikelola dengan baik agar mampu menunjang kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan. (Dinar Rizki & Dyah Lituhayu, 2017)

Transportasi umum juga punya peran vital dalam menunjang pergerakan masyarakat di wilayah perkotaan. Sistem yang dikelola secara efektif dan efisien tidak hanya memfasilitasi perpindahan orang serta barang, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai kota besar di Indonesia, pengelolaan transportasi umum menjadi tantangan yang cukup kompleks. Hal ini terutama berkaitan dengan manajemen aset daerah, seperti armada kendaraan, halte, terminal, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya yang perlu dikelola secara optimal agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.

Kota Palembang sebagai salah satu wilayah metropolitan di Pulau Sumatera memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan semakin beragamnya aktivitas masyarakat, kebutuhan terhadap layanan transportasi umum yang layak dan memadai pun menjadi semakin mendesak. Pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan terus berupaya menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi serta terjangkau bagi warga. Salah satu wujudnya adalah pengoperasian Trans Musi sebagai layanan Bus Rapid Transit (BRT), serta keberadaan angkutan kota (angkot) sebagai moda transportasi konvensional yang masih dimanfaatkan masyarakat.

Trans Musi pernah menjadi andalan utama transportasi umum berbasis bus di Kota Palembang. Dalam rangka mendorong modernisasi sistem transportasi, layanan ini menghadirkan bus berkapasitas besar yang mampu menampung penumpang dalam jumlah cukup banyak. Pengoperasian bus berukuran besar tersebut bukan hanya menambah daya angkut, tetapi juga membentuk kesan transportasi publik yang lebih tertata dan profesional. Namun pada praktiknya, bus kota yang selama ini menjadi andalan transportasi masyarakat perkotaan banyak yang sudah berusia tua dan mengalami penurunan kondisi. Armada tersebut kerap menimbulkan kesan kurang terawat, sehingga dianggap tidak cukup aman maupun nyaman bagi para penumpang (Muhammad Deni et al, 2022).

Meski sempat jadi andalan, dalam perjalanannya Trans Musi mengalami perubahan yang cukup besar. Saat ini, bus berukuran besar yang dulu menjadi

---

identitas layanan tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Layanan yang berjalan kini lebih didominasi oleh bus dengan ukuran yang lebih kecil. Pengelolaan aset ini berhubungan dengan manajemen aset yang mencakup identifikasi, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, serta penghapusan aset guna memastikan keberlanjutan layanan (Gavrikova, Volkova, and Burda 2020). Tidak beroperasinya lagi bus besar sebagai bagian dari aset transportasi publik dapat menjadi indikasi adanya kendala dalam siklus manajemen aset, mulai dari proses pengadaan sampai tahap pengawasan dan evaluasi.

Tersedianya layanan angkutan umum yang berkualitas dapat menekan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas dan meminimalkan kemacetan di wilayah Kota Palembang (Oktariansyah et al, 2017). Tidak beroperasinya lagi bus besar Trans Musi saat ini berpotensi menurunkan kapasitas angkut penumpang, terutama pada jam-jam sibuk. Bus dengan ukuran lebih kecil tentu memiliki daya tampung yang lebih terbatas dibandingkan armada besar yang sebelumnya digunakan. Situasi ini dapat menyebabkan waktu tunggu menjadi lebih lama, tingkat kenyamanan menurun, serta berkurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko mendorong peralihan ke kendaraan pribadi, yang pada akhirnya dapat memperparah kemacetan dan meningkatkan tingkat polusi di kawasan perkotaan.

Di sisi lain, angkutan kota (angkot) sebagai moda transportasi konvensional masih terus beroperasi di berbagai trayek di Kota Palembang. Angkot memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas serta kemampuan menjangkau area yang belum sepenuhnya dilayani oleh Trans Musi. Namun demikian, angkot juga menghadapi sejumlah persoalan, seperti kondisi armada yang tidak seragam, standar pelayanan yang berbeda-beda, serta keterbatasan dalam aspek pengawasan. Bahkan, sebagian armada dinilai sudah dalam kondisi kurang baik dan tidak sepenuhnya layak beroperasi. Banyaknya armada angkutan umum yang beroperasi dalam kondisi tidak layak jalan berpotensi menimbulkan kemacetan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas (Ari widayanti et al, 2014).

Tidak beroperasinya lagi bus berukuran besar pada layanan Trans Musi mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan aset daerah yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah langkah itu merupakan bagian dari strategi efisiensi operasional?, atau justru dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta kurang optimalnya pemeliharaan aset. Selain itu, perlu ditelaah bagaimana proses perencanaan kebutuhan armada dilakukan dan sejauh mana evaluasi terhadap kinerja aset transportasi dijalankan. Berbagai pertanyaan tersebut penting untuk dijawab guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai tata kelola aset daerah di sektor transportasi umum, khususnya di Kota Palembang.

Penelitian ini berorientasi pada analisis pengelolaan aset daerah di bidang transportasi umum, dengan fokus pada layanan Trans Musi dan angkutan kota di Kota Palembang. Penekanan utama diberikan pada perubahan struktur armada Trans Musi, khususnya berhentinya operasional bus berukuran besar, serta dampaknya terhadap mutu pelayanan publik dan efisiensi tata kelola aset. Dengan

---

mengkaji tahapan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset, penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi nyata pengelolaan transportasi umum daerah.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan operasional armada sekaligus hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola aset transportasi. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pengelolaan aset transportasi umum agar lebih efektif, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, pengelolaan aset transportasi daerah tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, layak, dan terjangkau. Berhentinya operasional bus besar Trans Musi dapat dijadikan titik tolak untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem manajemen aset daerah, demi mewujudkan transportasi umum yang lebih efisien dan berdaya saing ke depan.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap konsep, regulasi, serta implementasi pengelolaan aset daerah di sektor transportasi umum, terutama pada sistem Trans Musi dan moda Angkutan Kota. Adapun metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, objektif, dan faktual mengenai fenomena yang dikaji berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Tinjauan literatur dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mengkaji sejumlah sumber yang relevan terkait pengelolaan aset daerah serta sistem transportasi umum. Data penelitian diperoleh dari berbagai rujukan, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen lembaga terkait, hingga hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan fokus kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara mencari, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan aset daerah di sektor transportasi umum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah dan memahami isi dokumen untuk menemukan pola, melihat kesesuaian dengan peraturan, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan aset. Melalui cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai pengelolaan aset daerah pada sektor transportasi umum, khususnya Transmusi dan angkutan umum lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Pengelolaan Aset Transportasi Umum di Kota Palembang*

Pengelolaan aset daerah di sektor transportasi umum pada Kota Palembang meliputi berbagai unsur, seperti armada kendaraan (bus Trans Musi dan angkutan kota/angkot), halte, terminal, depo, serta fasilitas penunjang operasional lainnya.

Seluruh elemen tersebut dalam kerangka manajemen aset daerah tergolong sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan suatu proses yang komprehensif dan berkesinambungan, yang mencakup seluruh tahapan siklus hidup aset. Tahapan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, , pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga kegiatan pengawasan dan pengendalian (Deni Setiawan et al, 2025).

Berdasarkan hasil kajian, pengelolaan aset transportasi umum di Kota Palembang menunjukkan sejumlah tantangan, terutama pada armada Trans Musi. Perubahan yang cukup mencolok tampak dari tidak lagi beroperasinya bus berukuran besar yang sebelumnya menjadi identitas utama layanan tersebut. Saat ini, kegiatan operasional lebih banyak menggunakan bus berukuran sedang hingga kecil. Situasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam siklus manajemen aset, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Di sisi lain, angkutan kota (angkot) sebagai moda transportasi konvensional masih tetap beroperasi dengan pola pengelolaan yang berbeda. Angkot umumnya dikelola oleh perorangan atau koperasi, sehingga aspek pengawasan dan standarisasi aset cenderung lebih terbatas dibandingkan sistem Trans Musi yang berada dalam kerangka kebijakan dan pengelolaan pemerintah daerah.

### *Analisis Tahapan Pengelolaan Aset Trans Musi*

#### *a. Perencanaan dan Pengelolaan aset*

Pada tahap perencanaan awal, bus berukuran besar pada layanan Trans Musi dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat dalam skala besar, Dengan kapasitas angkut yang lebih besar, armada ini secara konseptual dinilai lebih efisien dalam menekan jumlah kendaraan di jalan serta membantu mengurangi kemacetan. Akan tetapi, dalam praktiknya saat ini, bus besar tersebut sudah tidak lagi tampak dalam operasional harian. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksinkronan antara perencanaan awal dan implementasi jangka panjang. Sejumlah faktor diduga turut memengaruhi situasi tersebut, antara lain:

- Biaya operasional dan perawatan yang tinggi
- Keterbatasan anggaran pemeliharaan
- Kondisi infrastruktur jalan yang tidak sepenuhnya mendukung
- Penurunan jumlah penumpang pada periode tertentu

#### *b. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset*

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan memperbaiki Barang Milik Daerah agar tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap digunakan secara efektif serta efisien. (Arif Wicaksana, et al, 2021). Bus berukuran besar membutuhkan perawatan yang lebih rumit dibandingkan bus kecil, baik dari sisi mesin, sistem kelistrikan, maupun struktur bodi. Jika proses pemeliharaan tidak dilaksanakan secara rutin dan terencana, maka umur ekonomis kendaraan dapat berkurang secara signifikan. Tidak lagi beroperasinya bus besar Trans Musi dapat mengindikasikan bahwa mekanisme pemeliharaan belum berjalan secara optimal. Keterbatasan ketersediaan suku cadang, kurangnya tenaga teknis, serta minimnya anggaran perawatan

---

berpotensi mempercepat pemeliharaan belum berjalan secara optimal. Keterbatasan ketersediaan suku cadang, kurangnya tenaga teknis, serta minimnya anggaran perawatan berpotensi mempercepat penurunan kondisi armada. Dalam konteks manajemen aset publik, kelemahan pada tahap pemeliharaan kerap menjadi faktor utama yang menyebabkan menurunnya mutu pelayanan kepada masyarakat.

### *c. Penghapusan dan Pergantian Aset*

Apabila suatu aset sudah tidak lagi memenuhi standar kelayakan, pemerintah daerah memiliki prosedur penghapusan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, proses penghapusan seharusnya disertai dengan perencanaan penggantian yang matang agar kesinambungan pelayanan publik tetap terjaga. Dalam konteks Trans Musi, ketiadaan bus berukuran besar tanpa adanya armada pengganti dengan kapasitas sebanding berdampak pada menurunnya daya angkut penumpang. Meskipun bus berukuran kecil dinilai lebih fleksibel dan relatif lebih efisien dari sisi biaya operasional, kapasitasnya belum mampu sepenuhnya menggantikan peran bus besar, khususnya pada jam-jam sibuk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses transisi aset belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan aktual masyarakat.

### *Dampak Terhadap Kinerja Pelayanan Transportasi*

Ketiadaan bus besar Trans Musi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan transportasi umum. Beberapa dampak yang teridentifikasi antara lain:

#### **1. Penurunan Kapasitas Angkut**

Bus kecil memiliki daya tampung terbatas, sehingga pada jam sibuk terjadi kepadatan penumpang dan peningkatan waktu tunggu.

#### **2. Menurunnya Kenyamanan dan Minat Masyarakat**

Kepadatan dalam kendaraan berpotensi mengurangi kenyamanan pengguna. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, masyarakat cenderung beralih ke kendaraan pribadi.

#### **3. Efektivitas Operasional Menurun**

Untuk menggantikan satu bus besar, diperlukan beberapa unit bus kecil. Hal ini justru dapat meningkatkan jumlah kendaraan di jalan dan mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan.

#### **4. Citra Layanan Publik Menurun**

Perubahan dari bus besar ke bus kecil dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang modern dan berkualitas.

### *Perbandingan Dengan Pengelolaan Angkutan Kota (Angkot)*

Berbeda dengan Trans Musi, angkutan kota (angkot) tidak sepenuhnya bergantung pada aset milik pemerintah daerah. Armada angkot umumnya dimiliki oleh perorangan atau kelompok usaha. Pemerintah lebih berperan dalam aspek regulasi dan perizinan. Meskipun demikian, kondisi armada angkot yang beragam menunjukkan bahwa pengelolaan aset secara mandiri juga menghadapi tantangan seperti:

- Usia kendaraan yang relatif tua
- Standar keselamatan dan kenyamanan yang belum seragam
- Kurangnya peremajaan armada

### *Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Aset*

Secara keseluruhan, temuan analisis menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada sektor transportasi umum di Kota Palembang masih belum berjalan secara optimal, terutama terkait keberlanjutan armada Trans Musi. Tidak beroperasinya lagi bus berukuran besar mengindikasikan adanya kendala dalam siklus hidup aset (*asset life cycle*), khususnya pada tahap pemeliharaan dan perencanaan penggantian. Efektivitas manajemen aset seharusnya tidak hanya dinilai dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari sejauh mana aset tersebut berdampak pada mutu pelayanan publik. Sarana transportasi publik bukan sekadar aset inventaris, melainkan alat utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan terkait pengadaan, penghapusan, maupun perubahan jenis armada perlu didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif serta perencanaan jangka panjang yang terukur.

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola aset daerah pada sektor transportasi umum yang mencakup Trans Musi dan angkutan kota (angkot) di Kota Palembang masih memerlukan perbaikan. Tidak beroperasinya lagi bus berkapasitas besar pada layanan Trans Musi mengindikasikan adanya permasalahan dalam siklus pengelolaan aset, terutama pada aspek perawatan, perencanaan penggantian, serta kesinambungan operasional. Dampak yang dirasakan antara lain penurunan daya angkut dan potensi berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, angkot tetap menjadi bagian penting dalam mobilitas perkotaan, namun masih menghadapi kendala dalam hal pembaruan armada dan penerapan standar pelayanan yang konsisten. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset transportasi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penyusunan rencana peremajaan armada berdasarkan kebutuhan kapasitas penumpang, penguatan mekanisme pemeliharaan secara terjadwal, serta peningkatan integrasi antara Trans Musi dan angkot dalam kerangka sistem transportasi yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Dengan manajemen aset yang lebih terarah dan bertanggung jawab, diharapkan mutu layanan transportasi umum di Kota Palembang dapat semakin optimal.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 99-110
- Deni, M., Trianto, A., Bangsawan, A., & Permana, K. W. A. (2022). Pengaruh PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI TEMAN BUS PT. TRANS MUSI

PALEMBANG JAYA DI KOTA PALEMBANG. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 5(2), 364-372.

Gavrikova, E., Volkova, I., & Burda, Y. (2020). Strategic aspects of asset management: An overview of current research. *Sustainability (Switzerland)*, 12(15).

Oktariansyaha, R. D., Usmanc, B., & Putrad, A. E. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Transmusi) Melalui Kinerja Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Palembang. *J. Manaj. Dan Bisnis Sriwij*, 15(1), 49-61.

Oktavianti, D. R., & Lituhayu, D. (2017). Implementasi kebijakan transportasi umum di Kota Semarang (Studi kasus Perum DAMRI). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 1-11

Wicaksana, A., Harmono, H., & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-41

Widayanti, A., & Karunia, B. (2014). Permasalahan dan pengembangan angkutan umum di kota surabaya. *Jurnal Transportasi*, 14(1).